
NOTA DINAS
NOMOR : 3/IJ-IND.3/PR//IV/2021

Kepada Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur II
Perihal : Laporan PP 39 Inspektorat II Triwulan I tahun 2021
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Tanggal : 8 April 2021

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Rencana dan Capaian Kegiatan (Laporan PP 39) Inspektorat II Inspektorat Jenderal Triwulan I (Januari - Maret) 2021.

Demikian, atas arahan Bapak lebih lanjut, disampaikan terima kasih.

Inspektur II



Wawas Swathatafrijiah

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT II

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT II**

**TRIWULAN I
TAHUN 2021**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

JAKARTA, 9 April 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan informasi atas capaian kinerja Inspektorat II selama Triwulan I Tahun 2021, sebagai dasar pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat II yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat II dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat II, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, 8 April 2021

Inspektur II



Wawas Swathatafrijiah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS DAN FUNGSI	1
B. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	5
A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019	5
B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	7
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN.....	8
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI	8
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	10
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN.....	13
D. LANGKAH DAN TINDAK LANJUT.....	13
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas- tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat II mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

B. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN

Agar fungsi - fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan di tempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2021 adalah :

- a. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- c. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
- b. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
- c. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
- d. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
- f. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
- g. Menerapkan audit berbasis resiko.

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian". Kegiatan Inspektorat II adalah "Peningkatan

Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II”, dengan output pada Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Output Pengawasan Inspektorat II tahun 2021

NO	OUTPUT	SATUAN	KET
001	Audit Program Prioritas dan Program Satker Cakupan tugas Inspektorat II	4 Laporan	
002	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satker Cakupan tugas Inspektorat II	13 Laporan	
003	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	1 Laporan	
004	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	1 Laporan	
005	Anggaran Satker Inspektorat II	1 Laporan	
006	Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	5 Laporan	

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustria, Organisasi Inspektorat II dipimpin oleh Inspektur II yang merupakan Pejabat Eselon II.

Inspektorat II membawahi:

1. Subbagian Tata Usaha

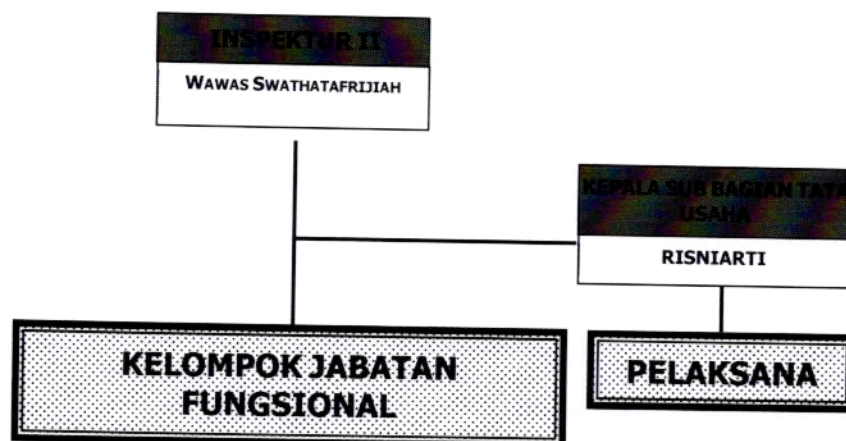
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pada tahun 2021 ini, Inspektorat II memiliki total pegawai sebanyak 18 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 14 (tiga belas) orang Auditor, dan 2 orang Pelaksana.



BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Inspektorat II pada tahun 2021 mempunyai Kegiatan "Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II" dengan anggaran sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** Pagu ini mengalami Penghematan sebesar **Rp. 120.000.000,-** yang dialokasikan untuk penanganan Covid 19 , Pagu Inspektorat II pada Triwulan I tahun 2021 menjadi sebesar **Rp. 1.880.000.000,-** yang terdiri dari Layanan Pengawasan Internal Inspektorat II, Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran satuan kerja Cakupan Tugas Inspektorat II, Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II, Layanan Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II, Layanan Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II, dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II. Alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

Tabel 2. Alokasi Anggaran dan Aktivitas Inspektorat II Tahun Anggaran 2021

kode	Uraian	vol	Pagu Awal	Pagu Revisi
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II		2.000.000.000	1.880.000.000
1842.TAK.001	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	4 Laporan	972.926.000	1.012.574.000
051	Audit Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		109.168.000	109.168.000
052	Audit Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		797.317.000	903.406.000
A	Audit Kinerja pada Program Pengembangan dan Penumbuhan Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan BPIPI		177.240.000	177.240.000
B	Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi PIKM Pada Dinas Perindustrian Provinsi		620.077.000	726.166.000
053	Audit Khusus		66.441.000	-

1842.TAK. 002	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	13 Laporan	93.396.000	93.396.000
051	Reviu LK-BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		83.912.000	83.912.000
A	Reviu LK-BMN		45.202.000	45.202.000
B	Reviu PIPK		37.710.000	38.710.000
052	Reviu RKA-KL Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		9.484.000	9.484.000
1842.TAK. 003	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	1 Laporan	8.468.000	8.468.000
051	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		8.468.000	8.468.000
1842.TAK. 004	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	1 Laporan	701.634.000	390.786.000
051	Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		701.634.000	390.786.000
A	Pengawasan Penyelesaian Hibah BMN Satker Binaan Inspektorat II		338.762.000	390.786.000
B	Pengawasan kegiatan Prioritas Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA		90.768.000	-
C	Pengawasan Penyelesaian Hibah BMN Satker Binaan Inspektorat II		272.104.000	272.104.000
1842.TAK. 005	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II	1 Laporan	175.556.000	337.556.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		175.556.000	337.556.000
A	Pengelolaan Arsip dan Ketatausahaan Inspektorat II		132.304.000	308.704.000
B	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Inspektorat II		20.384.000	13.184.000
C	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Inspektorat II		22.868.000	15.668.000
1842.TAK. 006	Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	5 Laporan	48.020.000	37.220.000
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan AkuntabilitaS		48.020.000	37.220.000
A	Penyusunan Laporan PP39 (Triwulanan)		8.968.000	8.968.000
B	Penyusunan Laporan PP39 (Triwulanan)		15.684.000	12.084.000
C	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat I		23.368.000	16.168.000

B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan Inspektorat II pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja TA 2021

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	1,4%
		S2	Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	8%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%
		S4	Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti olehsatker cakupan tugas Inspektorat *IKU	91,5%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Indeks Penerapan manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	L1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%
		L2	Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Realisasi keuangan kegiatan Layanan Pengawasan Internal, Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran, Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri, layanan Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Layanan Anggaran, dan Evaluasi Kegiatan pada Triwulan I tahun 2021 (Januari-Maret) sesuai aplikasi PP39 mencapai Rp. 136.864.000,- atau sebesar 7,28% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.880.000.000,- dengan realisasi capaian Fisik sebesar 11.80%

Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2021 (Januari – Maret) sesuai aplikasi PP39 mencapai Rp. 136.864.000,- Atau sebesar 7.28% dari total anggaran Rp. 1.880.000.000,- dengan realisasi capaian fisik sebesar 13.43% dan sesuai SAS sebesar Rp. 136.841.110,- atau 7,28%. Nilai realisasi keuangan pada Aplikasi PP39 sama dibandingkan dengan realisasi dalam Aplikasi SAS. Pada waktu pembuatan laporan PP39 TW1 ini ada kendala pada Aplikasi PP39 di Intranet dan sudah dilaporkan melalui Help Desk dan masih dalam perbaikan, sehingga tampilan pada lampiran Form A tidak ada rincian Sub Output.

Tabel 4. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Inspektorat II Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Sesuai aplikasi PP39

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan Ini			s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan I	
		Fisik (%)	Keuangan	%	Fisik (%)	Keuangan	%	J u m l a h	%
Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	1.102.574.000		58.973.760	5,34		58.973.760	5,34	953.600.240	86,48
Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	93.396.000		54.749.642	58,62		54.749.642	58,62	38.646.358	41,38
Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	8.468.000		3.297.600	38,94		3.297.600	38,94	5.170.400	61,05
Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas IR II	390.786.000		10.821.108	2,76		10.821.108	2,76	379.964.892	97,23
Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II	337.556.000		6.538.800	1,93		6.538.800	1,93	331.017.200	98,06
Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	37.220.000		2.460.200	6,61		2.460.200	6,61	34.759.800	93,39
	1.880.000.000	11.80	136.864.000	7,28	11.80	136.864.000	7,28	1.743.158.890	92,72

Realisasi Sesuai Aplikasi SAS

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan I	
		Fisik (%)	Keuangan	%	J u m l a h	%
Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	1.102.574.000		58.973.760	5,34	953.600.240	86,48
Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	93.396.000		54.749.642	58,62	38.646.358	41,38
Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	8.468.000		3.297.600	38,94	5.170.400	61,05
Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas IR II	390.786.000		10.821.108	2,76	379.964.892	97,23
Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II	337.556.000		6.538.800	1,93	331.017.200	98,06
Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	37.220.000		2.460.200	6,61	34.759.800	93,39
	1.880.000.000	11.80	136.841.110	7,28	1.743.158.890	92,72

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat II yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat II menetapkan Indikator Kinerja dan merupakan indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap sasarannya di perspektif pemangku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal, analisis capaian kinerja dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja TA 2021 yang telah ditetapkan yaitu :

Tabel 5. Realisasi Perkembangan Perjanjian Kinerja TA 2021

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	1,4%		Belum dapat diukur
		S2	Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	8%		Belum dapat diukur
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%		Belum dapat diukur
		S4	Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *IKU	91,5%		Belum dapat diukur
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) *IKU	Level 3		Belum dapat diukur
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%		Belum dapat diukur
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	25 %	1 dari 4 kegiatan audit yang sudah dilaksanakan Inspektorat II

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	L1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	24%	6 dari 25 jenis kegiatan Inspektorat II dalam PKPT
		L2	Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	9,19%	26 yang tidak sesuai peran penugasan dari 283 yang ditugaskan pada 5 kegiatan

Sasaran Program Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja:

1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II target 1,4%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan I belum dapat diukur dikarenakan sampai laporan PP39 ini disusun BPK masih melakukan proses pemeriksaan.
2. Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II target 8%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan I belum dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang masih dalam proses selesai yaitu hasil audit pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transfortasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE) dimana hasil temuan auditnya belum Final, sehingga capaian pada Triwulan I ini belum dapat diukur dikarenakan belum dapat diketahui berapa jumlah temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti (cacat temuan).
3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 85%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan I belum dapat diukur dikarenakan belum ada konsultasi dan/atau pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat II.
4. Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II dengan target 91,5%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan I belum dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sedang dilakukan yaitu Audit pada Direktorat Jenderal ILMATE. Dimana

dari hasil audit matrik temuan dan rekomendasi belum final. Sehingga realisasi capaian kerjanya pada Triwulan I adalah 0 persen.

Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin dengan target Level 3, realisasi capaian kerjanya pada Triwulan I belum dapat diukur dikarenakan kegiatan penilaian maturitas SPIP baru dilaksanakan pada Triwulan III atau Triwulan IV;

Sasaran Program Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif dengan indikator kinerja:

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan target 75%, realisasi capaian kerjanya pada Triwulan I belum dapat diukur dikarenakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan pengawasan di Inspektorat II dengan standar pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan pada Triwulan I oleh Bagian Program dan Evalap Inspektorat Jenderal.
2. Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 77%, realisasi capaian kerjanya pada Triwulan I dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilakukan dengan menggunakan bantuan lima aplikasi berbasis komputer yaitu aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, dan RKA-K/L. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah selesai dan memenuhi kriteria tersebut adalah Audit pada Ditjen ILMATE. Sehingga capaian realisasi kerjanya pada Triwulan I adalah 25% (1 dari 4 kegiatan audit yang sudah dilaksanakan Inspektorat II)

Sasaran Program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien dengan indikator kinerja:

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT adalah 80%, realisasi capaian kerjanya pada Triwulan I dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dengan PKPT yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT

(kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT) pada Triwulan I adalah pelaksanaan audit di Ditjen ILMATE, dan pelaksanaan Reviu LK/BMN Semester II TA 2019 dan Reviu PIPK pada Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA, dan BPIPI Sidoarjo, Audit Dana Dekonsentrasi pada provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bali, Pengawasan/Evaluasi Hibah BMN pada Kabupaten Bogor, Tasimalaya, pati dan Rembang, Batang dan Pekalongan, Kota Lampung, Kabupaten Lombok Barat, Kota Bitung, dan Kab. Ciamis, Penilaian SAKIP Eselon II Direktorat Jenderal IKMA dan Direktorat Jenderal ILMATE Sehingga capaian realisasi kinerjanya pada Triwulan I adalah 24 % (6 dari 25 jenis kegiatan Inspektorat II dalam PKPT).

2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 90%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan I dapat diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Inspektorat II ada 5, yaitu kegiatan Reviu pada Ditjen ILMATE , Ditjen IKMA dan BPIPI Sidoarjo (16 orang yang tidak sesuai peran), Audit Tematik pada Ditjen ILMATE (3 orang yang tidak sesuai peran), Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi (3 orang yang tidak sesuai peran) , Consulting/Pengawasan Hibah BMN (4 orang yang tidak sesuai peran, dan Evaluasi Penilaian SAKIP. Sehingga capaian realisasi kinerjanya pada Triwulan I adalah 9,19 % (26 yang tidak sesuai peran penugasan dari 283 yang ditugaskan pada 5 kegiatan diatas).

C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada Triwulan I tahun 2021 mengalami kendala yang cukup berarti dimana pada waktu pembuatan laporan PP39 TW1 ini ada kendala pada Aplikasi PP39 di Intranet dan sudah dilaporkan melalui Help Desk dan masih dalam perbaikan, sehingga tampilan pada lampiran Form A tidak ada rincian Sub Output.

D. LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Berkoordinasi pada Pusdatin untuk memperbaiki aplikasi PP39 yang ada di Intranet.
2. Berkoordinasi kebagian keuangan dan bagian program agar realisasi kegiatan/program dan keuangan sesuai dengan PKPT.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode triwulan I Tahun 2021 telah berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2021 (Januari-Maret) sesuai aplikasi PP39 mencapai Rp. 136.864.000,- atau sebesar 7,28% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.880.000.000,- dengan realisasi capaian Fisik sebesar 11.80%.

Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2021 (Januari – Maret)) sesuai aplikasi PP39 mencapai Rp. 136.864.000,- Atau sebesar 7.28% dari total anggaran Rp. 1.880.000.000,- dengan realisasi capaian fisik sebesar 13.43% dan sesuai SAS sebesar Rp. 136.841.110,- atau 7,28%. Nilai realisasi keuangan pada Aplikasi PP39 sama dibandingkan dengan realisasi dalam Aplikasi SAS.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat II periode Triwulan I Tahun 2021, untuk dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021
INSPEKTORAT II**

I. DATA UMUM

- | | |
|---|--|
| 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi | : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi | : 04. Ekonomi |
| 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi | : 04.07. Industri Dan Konstruksi |
| 4. Nomor Kode dan Nama Program | : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen |
| 5. Indikator Hasil | : |
| 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan | : 1842 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tu |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke | : 1/1 |
| 8. Penanggung Jawab Kegiatan | : Drs Wawas Swathatafrijiah, M.Sc., QIA |
| 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan | : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5 |
| 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA | : SP DIPA- 019.06.1.247885/2021 |

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
TAK Layanan Pengawasan Internal		-	1,880,000	1,880,000		25 Laporan
Total		-	1,880,000	1,880,000		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TAK Layanan Pengawasan Internal	-	-	-	-	14.88	7.28	27.12	11.80	14.88	7.28	27.12	11.80	DKI JAKARTA
Jumlah	-	-	-	-	14.88	7.28	27.12	11.80	14.88	7.28	27.12	11.80	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
-	-	TIDAK ADA KENDALA	-	-

Jakarta, 8 April 2021

Inspektur II
Inspektorat Jenderal



Wawas Swathatafrijiah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

REALISASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 TRIWULAN I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Triwulan I				Penanggung Jawab	Pelaksana	
					Target Total	Rencana	%	Realisasi			%
1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	- Audit Kinerja - Audit Khusus - Reviu RKAKL - Monev SAKIP Satker Cakupan Inspektorat II - Monev WUB dan Monev DAK - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Pengawasan penyelesaian hibah BMN - Reviu LKBMN - Reviu PIPK		1.40%	- Audit Kinerja - Reviu LKBMN - Reviu PIPK - Pengawasan penyelesaian hibah BMN	25	Telah dilakukannya: - Audit Kinerja pada Diten ILMATE, BPIPI, Dana Dekonsentrasi Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Maluku - Reviu LKBMN pada Ditjen IKMA, Ditjen ILMATE dan BPIPI, - Reviu PIPK pada Ditjen IKMA, Ditjen ILMATE dan BPIPI. - Evaluasi SAKIP Es. II pada Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE; -Pengawasan Penyelesaian Hibah BMN. dan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi.	25%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	- Audit Kinerja - Audit Khusus - Reviu RKAKL		8%	- Audit kinerja - Audit Khusus		Telah dilakukannya Audit Kinerja pada Diten ILMATE, BPIPI, Dana Dekonsentrasi Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Maluku.	50%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat	Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat		85%	Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat	25	Belum ada pengaduan masyarakat	0%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		92%	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	25	Belum ada Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	0%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II yang baik	1. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat II	Konsultasi penyusunan peta risiko satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II		Level 3	Konsultasi penyusunan peta risiko satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II		Belum ada konsultasi penyusunan peta risiko satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II		Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL											
3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat II dengan standar pelaksanaan pengawasan	-Penyusunan Program Kerja dan Anggaran -Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya Cakupan Inspektorat II		75%	-Penyusunan Program Kerja dan Anggaran -Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya Cakupan Inspektorat II	25	Telah disusun: - Revisi PKPT Tahun 2021 - Laporan PP39 Tw. IV/2020 - Laporan LAKIP 2020 - Laporan Renkin 2022	25	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)			76%				25%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN											

4	Terwujudnya sistem Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	-Penyusunan Program Kerja dan Anggaran -Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya Cakupan Inspektorat II	80%	- Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas	25	Telah disusun: - Revisi PKPT Tahun 2021 - Laporan PP39 Tw. IV/2020 - Laporan LAKIP 2020 - Laporan Renkin 2022	24%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya		90%				9,19%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II

Jakarta, 8 April 2021

Inspektur II



Wawas Swathatafrijiah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

REALISASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 TRIWULAN I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Triwulan I				Penanggung Jawab	Pelaksana	
					Target Total	Rencana	%	Realisasi			%
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	- Audit Kinerja - Audit Khusus - Reviu RKAKL - Monev SAKIP Satker Cakupan Inspektorat II - Monev WUB dan Monev DAK - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Pengawasan penyelesaian hibah BMN - Reviu LKBMN - Reviu PIPK		1.40%	- Audit Kinerja - Reviu LKBMN - Reviu PIPK - Pengawasan penyelesaian hibah BMN	25	Telah dilakukannya: - Audit Kinerja pada Diten ILMATE, BPIPI, Dana Dekonsentrasi Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Maluku; - Reviu LKBMN pada Ditjen IKMA, Ditjen ILMATE dan BPIPI; - Reviu PIPK pada Ditjen IKMA, Ditjen ILMATE dan BPIPI; - Evaluasi SAKIP Es. II pada Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE; -Pengawasan Penyelesaian Hibah BMN; dan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi.	25%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	- Audit Kinerja - Audit Khusus - Reviu RKAKL		8%	- Audit kinerja - Audit Khusus		Telah dilakukannya Audit Kinerja pada Diten ILMATE, BPIPI, Dana Dekonsentrasi Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Maluku.	50%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat	Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat		85%	Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat	25	Belum ada pengaduan masyarakat	0%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		92%	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	25	Belum ada Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	0%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II yang baik	1. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat II	Konsultasi penyusunan peta risiko satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II		Level 3	Konsultasi penyusunan peta risiko satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II		Belum ada konsultasi penyusunan peta risiko satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II		Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL											
3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat II dengan standar pelaksanaan pengawasan	-Penyusunan Program Kerja dan Anggaran -Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya Cakupan Inspektorat II		75%	-Penyusunan Program Kerja dan Anggaran -Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya Cakupan Inspektorat II	25	Telah disusun: - Revisi PKPT Tahun 2021 - Laporan PP39 Tw. IV/2020 - Laporan LAKIP 2020 - Laporan Renkin 2022	25	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II

		2 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)			76%				25%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN											
4	Terwujudnya sistem Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	-Penyusunan Program Kerja dan Anggaran -Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya Cakupan Inspektorat II		80%	- Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas	25	Tejah disusun: - Revisi PKPT Tahun 2021 - Laporan PP39 Tw. IV/2020 - Laporan LAKIP 2020 - Laporan Renkin 2022	24%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya			90%				9,19%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II

Jakarta, 8 April 2021

Inspektur II



Wawas Swathatafrijiah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wawas Swathatafrijiah

Jabatan: Inspektur II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Masrokhan

Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2021

Inspektur Jenderal



Masrokhan

Inspektur II



Wawas Swathatafrijiah

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2021**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada satuan kerja cakupan tugas	1.4%
		S2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	8%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91,5%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin*)IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%
		L2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%

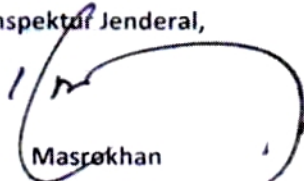
KEGIATAN

Pengawasan Efektifitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/KegiatanKementrian Prindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II

**ANGGARAN
Rp2,000,000,000**

Total Anggaran Tahun 2021 : **Rp2,000,000,000**
(Dua Milyar Rupiah)

Inspektur Jenderal,


Masrokh

Jakarta, 29 Januari 2021
Inspektur II


Wawas Swathatafrijiah